

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan mekanisme pemerintah di daerah dimana otonomi daerah benar-benar terlaksana dan menjadi kenyataan, sehingga diperlukan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Penyelenggaraan otonomi daerah ini didukung oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah.

Salah satu perubahan penting adalah kewenangan daerah yang semakin besar dalam menentukan kebijakan belanja daerah (*decentralized expenditure*). Daerah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan belanjanya ke dalam pos-pos belanja yang dianggap prioritas sesuai preferensi masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan teori *fiscal federalism* yang menyatakan bahwa “daerah lebih paham apa yang terbaik buat mereka”. Dengan otonomi terdapat dua aspek

keuangan yang dituntut agar lebih baik disbanding sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek yang kedua yaitu dari sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan (Mardiasmo, 2002:50).

Salah satu regulasi yang memuat reformasi pembiayaan adalah peraturan pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri N0.13/2006). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa efektivitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari Laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Anggaran Pendapatan seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah: dana perimbangan: dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

dan pasal 167 yang termasuk dalam belanja daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Seharusnya, pengalokasian pendapatan daerah kebelanja langsung harus lebih besar daripada kebelanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan suatu tindakan pengeluaran biaya untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kebanyakan fenomena sekarang ini memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja langsung lebih kecil dari pada pengalokasian belanja tidak langsung. Contohnya penelitian yang dilakukan Dibyو Prabowo pada tahun 2001 yang meneliti beberapa kabupaten/kota di Indonesia, dan dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar (berkisar 80%-90%) DAU masih dipergunakan untuk anggaran rutin (terutama gaji pegawai), sedangkan alokasi untuk anggaran pembangunan berkisar 10%-20%. (Hamid, 2004:117). Melalui kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka sudah menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara dalam membelanjakan anggaran yang ada agar dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk pembangunan daerahnya. Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2013-2014:

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2013-2014

JENIS BELANJA	2013	%	2014	%
1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung	368.337.929.803,00	65,25%	418.355.432.930,00	64,98%
Belanja Langsung	178.097.930.335,22	32,59%	225.436.230.874,00	35,01%
Total belanja	546.435.860.138,22		643.791.663.804,00	

Sumber: BKA Timor Tengah Utara

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, struktur belanja pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2013 presentase total belanja tidak langsung sebesar 65,25% dan belanja langsung sebesar 32,59%, sedangkan pada tahun 2014 total belanja tidak langsung sebesar 64,98% dan belanja langsung sebesar 35,01%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013-2014, menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara cenderung mengalami peningkatan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Belanja daerah di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dan diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Jika

dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di Tahun 2013 dan tahun 2014 komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan tidak langsung yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memenuhi syarat komposisi ideal karena belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor swasta Kabupaten Timor Tengah Utara.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejahtera pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran melainkan berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Analisis pertumbuhan belanja daerah memberi informasi perkembangan belanja dari tahun ke tahun, analisis keserasian belanja akan memberikan informasi tentang keseimbangan antara belanja sedangkan rasio efisiensi belanja akan memberikan informasi tentang penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi daerah

semakin meningkat. Berkaitan peran tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi dilapangan, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung dan mengetahui apakah memang selalu tidak memenuhi syarat setiap tahunnya atau mungkin hanya terjadi di Tahun 2013 dan 2014. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2013-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013-2016?
2. Bagaimana efisiensi belanja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013-2016?
3. Bagaimana pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah Tahun 2013-2016.
2. Mengetahui efisiensi belanja Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013-2016.
3. Mengetahui pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2013-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademis secara kritis yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya mengenai belanja daerah dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis, dalam hal ini memberikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai belanja daerah.